



Bansos Rp 46 M Terancam Hangus

★ Pimpinan DPRD Bali dan
Gubernur Rapat 'Darurat'

Pastika
masih tunggu
verifikasi Pergub
diturunkan
Mendagri,
sementara Adi
Wiryatama
akan datang
Kemendagri

DENPASAR, NusaBali

Dana bantuan sosial (bansos)
untuk masyarakat senilai Rp 46
miliar yang difasilitasi 55 anggota
DPRD Bali dalam APBD Peruba-
han 2015, terancam hangus alias
tidak cair. Masalahnya, Peraturan
Gubernur (Pergub) yang diajukan
Pemprov Bali sebagai payung
hukum pencairan bansos, belum

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

Edisi : Sabtu, 24 Oktober 2015

Hal : 1



Bansos Rp 46 M Terancam Hangus

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

diteken Menteri Dalam Negeri (Mendagri). DPRD Bali dan Gubernur Made Mangku Pastika pun menggelar rapat 'darurat' masalah bansos, Jumat (23/10).

Rapat 'darurat' antara DPRD Bali dan Gubernur Pastika digelar di Ruang Transit Gedung Dewan, Jumat siang. Pertemuan khusus membahas masalah pencairan bansos ini dilaksanakan sesaat setelah rapat paripurna pengesahan Raperda Disabilitas dan Raperda Arahkan Pengaturan Zonasi (APZ), di Gedung DPRD Bali.

Dalam rapat 'darurat' legislatif dan eksekutif kemarin siang, Ketua DPRD Bali dari Fraksi PDIP, Nyoman Adi Wiryatama, didampingi para Wakil Ketua Dewan yakni Nyoman Sugawa Korry (Fraksi Golkar), IBG Alit Putra (Fraksi Demokrat), dan Jro Komang Swastika (Fraksi Gerindra). Para Ketua Fraksi dan Ketua Komisi DPRD Bali juga hadir. Sedangkan Gubernur Pastika hadir dengan didampingi Wagub Ketut Sudikerta dan Sekda Provinsi Bali, Tjokorda Ngurah Pelayun.

Rapat 'darurat' yang berlangsung selama 1,5 jam kemarin, tertutup bagi media. Bahkan, anggota DPRD Bali yang bukan unsur pimpinan, juga tidak diizinkan masuk ke ruangan rapat. Pantauan NusaBali, ada salah satu anggota Dewan yang hendak masuk, tapi terpaksa keluar lagi, karena tidak ada kapasitas sebagai unsur pimpinan.

Seusai rapat 'darurat', unsur Pimpinan Dewan dan pejabat Pemprov Bali langsung meninggalkan Gedung DPRD Bali. Mereka rata-rata keluar dengan raut wajah agak tegang. Hasil pertemuan juga dirahasiakan dan tidak boleh dipublikasikan ke media. Karenanya, tak satu pun unsur Pimpinan Dewan mau buka suara soal hasil rapat 'darurat' pembahasan masalah bansos tersebut.

"Jangan tanya saya, ini sudah instruksi pimpinan tidak boleh ada yang bicarakan masalah bansos ke media," tegas salah satu unsur Pimpinan Dewan sembari meminta dengan sangat agar namanya tidak ditulis di koran.

Namun demikian, sumber tadi memberikan sedikit bocoran, bahwa pada intinya bansos/hibah tidak bisa cair kalau Pergub yang sedang diverifikasi di Kemendagri tak ditandatangani mendagri. Maklum, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Mendagri dan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penerima bansos/hibah harus lembaga yang berbadan hukum.

Kalau tidak ada badan hukumnya, payung hukum Pergub sebetulnya bisa dipakai dasar untuk mencairkan bansos. Namun, Pergub yang diajukan Pemprov Bali belum diteken Mendagri. "Hasil verifikasi Pergub juga belum turun dari Mendagri. Kalau pekan ini tidak ditandatangani juga, ya artinya bansos yang difasilitasi anggota Dewan akan hangus," ujarnya.

Sekadar dicatat, bansos yang

dipatok di APBD Perubahan 2015 nilainya mencapai Rp 46 miliar. Bansos sebesar itu difasilitasi 55 anggota DPRD Bali (24 orang dari Fraksi PDIP, 11 orang dari Fraksi Golkar, 8 orang dari Fraksi Demokrat, 7 orang dari Fraksi Gerindra, serta 2 orang dari NasDem, 1 orang dari Hanura, 1 orang dari PKPI, dan 1 orang dari PAN).

Kalau dana bansos tersebut batal cair, praktis akan menjadi SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). Maka, terulanglah kejadian tahun 2013 ketika sebagian besar bansos yang difasilitasi Dewan gagal cair, karena mepetnya waktu dan menumpuk di Biro Keuangan Setda Provinsi Bali.

Terancam tidak cairnya bansos dan hibah dalam APBD Peruba-

han 2015 ini, kontan membuat kalangan Dewan mulai ketar-ketir. Anggota DPRD Bali yang berstatus pendatang baru (pertama lolos melalui Pileg 2014), bisa mati kutu di daerah pemilihan (Dapil)-nya. Mereka bisa dianggap berbohong oleh rakyat, karena baru pertama kali mengurus bansos, sudah gagal cair.

"Tiyang sing bani metepuk ajak rakyat (Saya tidak berani ketemu sama rakyat), kalau bansos sampai gagal cair. Sebab, mereka pasti akan tanya bagaimana bansosnya," keluh salah satu anggota Fraksi PDIP DPRD Bali, Jumat kemarin.

Sementara itu, Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama mengatakan Pimpinan Dewan akan mendatangi Kemendagri di Jakarta,

Rabu (28/10) depan. Tujuannya, untuk membicarakan masalah bansos agar bisa cair. Adi Wiryatama menegaskan, kalau pun nanti tidak bisa tembus Mendagri Tjahjo Kumolo, tak apa Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri atau pejabat terkait lainnya menerima mereka.

"Kita ingin ada kepastian saja (terkait pencairan bansos). Sebab, ini urusan dana besar untuk masyarakat. Kami juga berharap masyarakat bisa bersabar. Mereka yang sudah ajukan proposal (bansos), sabar dan tunggu saja dulu," tegas poliyisi senior PDIP ini saat dikonfirmasi NusaBali, Jumat kemarin.

Dikonfirmasi terpisah, Gubernur Pastika mengakui bahwa rapat dengan Pimpinan Dewan, Jumat siang, untuk membahas masalah bansos. "Ya, saya sendiri masih tunggu Pergub yang sekarang diproses di Kemendagri. Kalau itu sudah ada, baru bisa jalan pencairan," tegas Pastika yang dihubungi NusaBali di Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala Denpasar kemarin.

Mantan Kapolda Bali ini menyatakan, berkas-berkas usulan bansos masyarakat yang masuk, sudah dicicil untuk ditandatangani. "Sehingga nanti kalau sudah ada dasar hukum yang jelas, kita tidak kelabakan dalam pencairannya. Sekarang saya cicil tandatangani usulan-usulan masyarakat yang masuk," tegas mantan Kapolda Bali yang juga penyandang 'Asia Star 20013' ini. **nat**



Baru Direhab Beberapa Tahun

Gedung SDN 5

Gegelang Roboh

"Padahal sehari sebelumnya saya mengajar di ruangan itu. Selama ini saya selalu waswas mengajar di ruang kelas I"

(Guru Pengajar di SD Gegelang)

AMLAPURA, NusaBali

Dua bangunan gedung kelas di SD Negeri 5 Gegelang, Kecamatan Manggis, Karangasem tiba-tiba roboh tanpa sebab yang jelas. Syukurnya musibah itu terjadi di luar jam sekolah, sehingga tidak ada korban jiwa maupun siswa cedera. Gedung yang roboh hanya dua kelas, dari empat kelas yang ada di satu gedung. Padahal gedung tersebut usai direhab pada sekitar tahun 2009 lalu.

Diduga, salah satu pemicunya kondisi gedung tertutup pohon-pohon rindang, sehingga kondisinya lembab, bangunan cepat rusak. Robohnya bangunan dua kelas, pukul 16.00 Wita, Kamis



• NUSABALI/NANTRA

GEDUNG SDN 5 Gegelang yang roboh dua kelas, terlihat dari tampak depan, Jumat (23/10).

(22/10). Padahal sehari sebelumnya kelas itu terpakai, untuk proses belajar mengajar siswa kelas I, sebanyak 18 siswa. AA Suciari, guru kelas I SD Negeri Gegelang menuturkan hal itu di Banjar/Desa Gegelang, Jumat (23/10).

AA Suciari menuturkan, bangunan tersebut telah keropos sejak 6 bulan lalu, ditandai bagian

atap bangunan amblas. Sebab, bagian kap dan reng telah keropos. Dua ruang kelas yang roboh itu, mulanya untuk ruang belajar kelas I dan kelas II. Karena di ruang kelas I, kondisinya sangat parah, maka berpindah belajar ke ruang kelas II.

Sedangkan untuk siswa kelas II pindah belajar ke ruang kelas III. Siswa kelas III belajar

Edisi : Sabtu, 24 Oktober 2015

Hal : 8



Sambungan - - -

di ruang parkir, desak-desakan. Selama ini menurut AA Suciari, mengaku selalu waswas mengajar siswa di kelas I, mengingat bangunan telah hancur terutama bagian atapnya.

"Ternyata benar, ruang kelas I dan ruangan kosong ambruk. Padahal sehari sebelumnya saya mengajar di ruangan itu. Selama ini saya selalu waswas mengajar di ruang kelas I," ujar AA Suciari.

Atas musibah itu, maka siswa kelas I belajar di teras bangunan sekolah. Pantauan di lapangan, bukan dua ruang kelas itu yang telah rusak, juga ruang kelas V dan ruang guru yang jadi satu bangunan. Sebab, bangunan tersebut posisinya di bawah pohon-pohon rindang, yang bersebelahan dengan kebun milik warga. Sehingga kondisi gedung selalu lembab.

Sejak dua ruangan roboh, katanya belum ada petugas dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Manggis dan Karangasem yang melakukan pengecekan. Guru kelas III I Ketut Tegeg, juga mengatakan demikian. "Belum ada yang datang mengecek kondisi ban-

gunan yang roboh," ujar Tegeg.

SD Negeri 5 Gegelang itu, yang berdiri 21 Juli 1980, hanya memiliki 88 siswa, yakni: kelas I sebanyak 18 siswa, kelas II 15 siswa, kelas III 11 siswa, kelas IV 18 siswa, kelas V 11 siswa dan kelas VI 15 siswa, dengan 7 guru pengajar. Sekolah itu, hanya didukung Banjar Gegelang, sehingga yang bersekolah hanyalah berasal dari satu kampung.

Kasek SD Negeri 5 Gegelang I Nengah Nurija, dihubungi tidak ada nada sambung. Di bagian lain Sekretaris Disdikpora Karangasem I Gede Basma mendengar ada kabar gedung SDN 5 Gegelang roboh. "Memang gedung yang roboh itu, dapat skala prioritas perbaikan," katanya.

Sebelumnya kata I Gede Basma, pihaknya sempat didatangi petugas Ombudsman menyodorkan foto gedung SD yang rusak berat, langsung mengajukan pertanyaan. "Apakah gedung seperti itu tidak layak dapat penanganan, siapa yang berwenang melakukan penanganan itu," demikian I Gede Basma, menyitir pernyataan petugas Ombudsman. **k16**



Dinas Antisipasi Kelompok 'Siluman' Penerima Bantuan

★ Bakal Lakukan Registrasi Kelompok Ternak

BANGLI, NusaBali

Pihak Dinas Peternakan dan Perikanan Bangli, bakal melakukan registrasi terhadap keberadaan kelompok ternak ikan. Hal ini dilakukan selain untuk mempermudah ketika melakukan pembinaan juga untuk mengantisipasi adanya kelompok siluman (asal-asalan). "Kita bakal segera melakukan registrasi terhadap kelompok yang berdiri, apalagi kaitanya setiap kelompok sesuai amanah undang-undang mesti berbadan hukum," ujar Kepala Dinas peternakan dan Perikanan Bangli,

Ir I Wayan Sukartana, Jumat (23/10).

Kata dia, fungsi dari registrasi juga untuk mengetahui sejauh mana perkembangan sebuah kelompok, apakah kelompok itu masih berjalan atau sudah tereliminasi. Dengan registrasi tentu bisa mengantisipasi kelompok siluman. Untuk itu, dalam kaitannya dalam pembinaan, bakal menasar semua kelompok terutama kelompok pemula, sehingga dari kelompok pemula diharapkan bakal berkembang menjadi kelompok utama. "Mudah-mudahan dari

kelompok pemula ini, satunya bisa naik menjadi kategori kelompok lanjut, madya dan utama" harapnya.

Lantas disinggung mengenai ada sebuah kelompok yang tidak berjalan lagi, padahal sebelumnya sempat mendapat gelontoran bantuan, Kata Sukartana, tentu untuk kelompok dimaksud bakal diberikan pembinaan dan sudah pasti pengurusnya bakal segera dipanggil. "Kita tidak ingin kecolongan, makanya kita akan selektif, apalagi kaitannya dalam pemberian bantuan," kata Sukartana. **cr53**

Edisi : Sabtu, 24 Oktober 2015

Hal : 8